

MODEL PEMBINAAN RASA KEBANGSAAN MELALUI CITIZENSHIP EDUCATION PADA MASYARAKAT ENTIKONG WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Mardawani, Agusta Kurniati

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang,
Jl. Pertamina Km 4 Sengkuang Sintang Kalimantan Barat
email: mardawani113@yahoo.co.id

Abstract: This study is motivated by the condition of West Kalimantan as one of the provinces whose territory is directly adjacent to the Malaysian state is often faced with a condition of society interacting with each other in the context of social life, economy and culture. The qualitative assessment method with case study type. The model of fostering nationalism through citizenship education in Entikong society The border region of Indonesia Malaysia is a persuasive model by inviting the community to actively participate in the success of government programs.

Keywords: coaching model, sense of nationality, citizen education

Abstrak: Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia sering sekali dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat yang saling berinteraksi baik dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Metode pengkajian menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus. Model pembinaan rasa kebangsaan melalui *citizenship education* pada masyarakat Entikong Wilayah perbatasan Indonesia Malaysia adalah model persuasif dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mensukseskan program pemerintah.

Kata Kunci: model pembinaan, rasa kebangsaan, wilayah perbatasan

Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia sering sekali dihadapkan pada suatu kondisi dimana masyarakatnya saling berinteraksi baik dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Disatu sisi, proses interaksi tersebut dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak, namun disisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif, misalnya muncul gejala semakin memudarnya rasa cinta masyarakat akan bangsa dan negara Indonesia yang ditampilkan dalam sikap dan tindakan yang nyata seperti penggunaan lambang negara, lagu kebangsaan dan kecintaan akan produk Indonesia yang semakin berkurang. Rasa kebangsaan atau nasionalisme pada masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan indikasi yang semakin pudar. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian berikut: (1) Survey Media Group pada tanggal 1 November 2007 tentang persepsi masyarakat

Indonesia terhadap Malaysia, 48 % mempersepsikan sebagai ancaman, 34 % sebagai sahabat, 18 % tidak memberikan jawaban. Sedangkan perasaan publik terhadap Malaysia, 65 % biasa?biasa saja, hanya 25 % yang mengatakan tidak suka, 10 % tidak memberikan jawaban. Survei yang dilakukan oleh Media Group dilatarbelakangi oleh keadaan dan situasi yang berkembang dalam masyarakat di sebagian besar wilayah Republik Indonesia yang memberikan reaksi terhadap sikap Malaysia yang mengklaim beberapa karya budaya masyarakat Indonesia sebagai karya budaya Malaysia, seperti batik dan tari reog. (2). Penelitian oleh Lemhannas tahun 2007 mengungkapkan tentang bagaimana sikap dan perilaku masyarakat di daerah penelitian berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ideologi dalam kehidupan bermasyarakat rendah, dalam

kehidupan berpolitik cukup dan tinggi dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya diungkapkan bahwa peran agama dalam kehidupan bermasyarakat tinggi, dalam kehidupan berpolitik cukup dan dalam kehidupan bernegara peran rendah.

Permasalahan tersebut diatas jika dibiarkan tanpa penyelesaian secara berkesinambungan maka tidak mustahil akan berkembang menjadi masalah yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, disisi lain penyelesaian dari pihak-pihak terkait masih sebatas konsep dan perdebatan belum sampai pada langkah konkrit. Upaya pemerintah dalam menangani masalah perbatasan masih bersifat insidental dan belum melembaga. Dari fakta tersebut, peneliti memandang bahwa penyelesaian masalah perbatasan penting dilakukan melalui suatu kegiatan yang terencana dan berkesinambungan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, peneliti menawarkan penyelesaian yang dianggap efektif yakni melakukan pendidikan yang berkesinambungan terhadap rasa kebangsaan melalui *Citizenship education* pada masyarakat perbatasan. *Citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas tidak diajarkan hanya terbatas di sekolah, tetapi lebih kepada pendidikan masyarakat. *Citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan yang diberikan tidak melalui pendidikan formal di sekolah melainkan pendidikan di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Strategi *Citizenship education* dalam pembinaan rasa kebangsaan diajarkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan kerjasama para tokoh masyarakat, perangkat kecamatan dan desa yang bersangkutan secara berkesinambungan.

Rasa kebangsaan pada umumnya dapat diartikan sebagai perasaan yang dimiliki seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya. Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945. Secara khusus, Rustri (2012) menyebutkan bahwa “secara garis besar wawasan kebangsaan memiliki komponen utama yaitu rasa kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan”. Rasa kebangsaan merupakan perekat utama kesatuan dan

persatuan masyarakat dan bangsa dalam wadah NKRI. Faham kebangsaan merupakan faham yang dianut oleh suatu bangsa sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sementara semangat kebangsaan merupakan landasan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.

Sejalan dengan pendapat Rustri di atas, Yulianto (2012), menambahkan bahwa “wawasan kebangsaan dari sudut pandang implementasi etika moral dapat membangun komitmen kebangsaan”. Komitmen kebangsaan sangat diperlukan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, terutama pada generasi muda. Memperkuat komitmen kebangsaan sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam penguatan jati diri dan identitas bangsa. Semangat kebangsaan sebagai implementasi dari wawasan kebangsaan harus berakar pada potensi kekayaan lokal bangsa, dan dibangun di atas paham pluralisme nasional. Dengan fondasi paham kebangsaan yang kuat dapat terbangun melalui semangat persatuan sebagai bangsa yang multikultur di tengah masyarakat globalisasi.

Komitmen moral bangsa Indonesia dalam membentuk paham kebangsaan yang tertinggi adalah idiologi Pancasila. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendro (2012:3) “Pancasila harus dipahami sebagai ideologi bangsa yang harus menjadi *way of life* bangsa. Karena pancasila merupakan hasil rumusan para founding father’s bangsa, yang melihat Indonesia dengan berbagai kompleksitas yang ada”. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa pemahaman semangat kebangsaan atau paham kebangsaan Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila.

Sementara itu, bagi masyarakat perbatasan, pengetahuan akan semangat kebangsaan dan komitmen kebangsaan berkaitan dengan nilai-nilai dasar bernegara sangatlah minim. Suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (*contract social*) dalam wujud kehidupan bernegara yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah sering hanya sampai pada tataran konseptual saja.

Banyak cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka pembinaan rasa kebangsaan pada masyarakat perbatasan. Terdapat tiga cara dalam membina nasionalisme, yakni melakukan sosialisasi nasionalisme Indonesia secara terus menerus. Kedua, meningkatkan

pembangunan ekonomi. Ketiga, menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sosialisasi rasa kebangsaan Indonesia, merupakan proses penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh warga negara, terutama bagi generasi muda. Penanaman nilai-nilai dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai perjuangan kemerdekaan, sejarah tokoh-tokoh nasional dan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan. Sarana yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, bisa melalui keluarga, sekolah, media massa, instansi pemerintah dan masyarakat.

Wilayah perbatasan adalah wilayah yang berbatasan langsung, baik darat, laut, udara, maupun perairan diantara kedua Negara (Hadiwijoyo, 2009:2). Berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang jasa (*smuggling*), pembalakan liar (*illegal logging*), perdagangan manusia anak-anak dan wanita (*human trafficking*) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas Negara yang tidak mudah ditanggulangi (Syaifullah, 2008: 5).

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia terlihat seperti tidak banyak kemajuan, sementara negara Malaysia semakin memperlihatkan kemajuan begitu pusat. Dari perspektif sejarah, lambatnya perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia yang berimplikasi terhadap kemiskinan masal pada masyarakat perbatasan, dipicu oleh pembangunan yang mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*). Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, masih merasa takut sehingga di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan nasional yang memadai.

Dalam konteks perbatasan, seperti Kalimantan Barat dan Serawak, kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antara kedua wilayah Negara, telah menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat perbatasan beralih ke negara Malaysia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, jalan menuju ke Malaysia ternyata jauh lebih mudah bilamana dibandingkan dengan Ibu kota Kecamatan/Kabupaten di wilayah Republik Indonesia, baik dari segi jarak tempuh maupun infrastruktur.

Sejalan dengan itu, Rini (2011) mengemukakan bahwa ada tiga persoalan di wilayah perbatasan. Pertama, dimensi lokal dapat dilihat dari adanya kesenjangan pendapatan yang

begitu jauh antara penduduk di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga. Kedua, permasalahan berdimensi nasional. Sepanjang jalur perbatasan, misalnya di Kalimantan Barat saja, diperkirakan melebihi cakupan wilayah daratan dari 2000 km, dengan sekitar 53 titik pos pengawasan, melintas antara Entikong, Paloh Sajingan, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Suatu rentang luas wilayah darat yang sukar di tempuh untuk berbagai kepentingan secara sosial ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan. Kondisi ini sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakkan kedaulatan di wilayah perbatasan. Masyarakat perbatasan mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan ilegal seperti mengeksploitasi sumber daya hutan, penyelundupan orang (TKI ilegal) serta barang dan jasa ke negara Malaysia.

Ketiga, masalah berdimensi internasional. Selama ini kebijakan dunia internasional dalam menangani sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara Malaysia sering dirasakan tidak netral, misalnya sengketa pulau, tapal batas, perlakuan terhadap TKI dan masih banyak lagi persoalan lainnya yang menyagkut negara.

Pendidikan Kewarganegaraan di negara-negara maju khususnya seperti di Inggris dan Amerika Serikat tidak lagi terbatas pada pembelajaran di sekolah yang secara formal diberikan melalui suatu interaksi pembelajaran antara guru dengan siswa yang dikenal dengan istilah *Civic Education*. Tetapi di negara-negara tersebut Pendidikan Kewarganegaraan sudah semakin luas, yakni sampai kepada pendidikan di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *Citizenship Education*.

Proses pembelajaran yang hanya terbatas di sekolah, menyebabkan tidak semua warga negara mengetahui atau menguasai materi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan tidak semua warga negara dapat memperoleh pendidikan formal, terutama masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Keterbatasan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal tersebut jelas akan berdampak pada sikap dan tindakan mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dalam dokumen tersebut citizenship diartikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan publik oleh

warga negara yang memiliki hak untuk itu, termasuk debat publik dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembuatan hukum dan keputusan negara. Maka yang dimaksud dengan warga Negara adalah “*a highly educated citizen democracy*” atau warga Negara demokratis yang terdidik, seperti yang ditegaskan oleh *the Lord Chancellor* bahwa “*we should not, must not, dare not, be complacent about the health of and the future of British democracy. Unless we become a nation of engaged citizens, our democracy is not secure*” (QCA, 1998:8). Tidaklah mungkin dicapai suatu demokrasi Inggris yang sehat dan prospektif, kecuali dikembangkan Inggris sebagai bangsa yang memiliki keterlibatan warganegara yang penuh. Oleh karena itu ditegaskan bahwa “*Citizenship education must be education for citizenship*”- pendidikan kewarganegaraan haruslah menjadi pendidikan untuk membangun jati diri kewarganegaraan; dengan pusat perhatian pada tiga “*strands*” atau garapan, yakni “*social and moral responsibility, community involvement and political literacy*”- atau pengembangan tanggung jawab sosial dan moral, melibatkan kemasyarakatan, dan kemelekitan. Dengan perkataan lain, bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan moral, peran dan keterlibatan di masyarakat, dan pemahaman tentang politik dan partisipasinya.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih berdasarkan permasalahan yang muncul dari adanya suatu kasus yang terjadi. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Objek pada penelitian ini adalah aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap masyarakat Kecamatan Entikong.

Penentuan subjek dan objek penelitian *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan pertimbangan peneliti, maka jumlah subjek masyarakat satu Desa yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni masyarakat Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong, jumlah yang direncanakan pada tahap

awal sejumlah 10 orang dan akan bertambah sesuai dengan keperluan sampel jenuh. Subjek dipilih menggunakan teknik *Snowball Sampling* atau sampel jenuh, dimana jumlah subjek penelitian cenderung bertambah berdasarkan keperluan. Kriteria penentuan subjek penelitian diantaranya: pernah mengenyam pendidikan minimal Sekolah Dasar, warga asli Desa Suruh Tembawang (dan atau berdomisili minimal 5 tahun di desa tersebut).

Sumber data diperoleh dari Camat, Kepala Desa, Warga Desa, peristiwa dan Lokasi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak lepas dari wawancara dan observasi lapangan yang melibatkan tempat, pelaku dan peristiwa yang terjadi. Dengan adanya peristiwa peneliti dapat mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi. Selain informan data juga diperoleh lewat Dokumen yang merupakan data pendukung berupa arsip, foto dan video aktivitas warga dalam konsep Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan.

Tahapan pengumpulan data terdiri dari 3 yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis data. Tahap Perencanaan dimulai dari mengurus perijinan dan administrasi terkait dengan rencana pelaksanaan penelitian. Menyusun skenario pelaksanaan penelitian terhadap model pembinaan rasa kebangsaan melalui *Citizenship education* yang akan dilaksanakan dalam penelitian dan menyusun instrumen penelitian yang berupa panduan wawancara, panduan observasi dan study dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian. Melakukan analisis kualitas instrumen dengan validator internal atau para ahli yang relevan.

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti terjun ke masyarakat untuk melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi kepada responden terkait dengan model pembinaan rasa kebangsaan melalui *citizenship education*. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain eksplorasi atau observasi umum, tahap eksplorasi terfokus, tahap pengumpulan data dan tahap konfirmasi data.

Tahap selanjutnya yakni tahap analisis data. Setelah selesai proses pengumpulan data, diperoleh sejumlah data kualitatif. Analisis dan pengolahan data berpedoman pada data yang terkumpul dan pertanyaan penelitian. Data kualitatif dari penelitian ini yaitu hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada warga Desa

Suruh Tembawang Kecamatan Entikong berkaitan dengan model Pembinaan rasa kebangsaan melalui *citizenship education* pada masyarakat Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

Pada tahapan analisis data, penelitian kualitatif bersifat induktif, bahwa semua simpulan dibentuk dari semua informan yang diperoleh dari lapangan. Proses analisis ini dilakukan bersamaan sejak awal dengan proses pengumpulan data dengan melakukan beragam teknik refleksi bagi pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh akan selalu dikomparasikan, setiap unit atau kelompoknya untuk melihat keterkaitan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu bagi pemantapan dan pendalaman data proses yang dilakukan dalam bentuk siklus sebagai usaha verifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase hanya merupakan langkah awal dari proses analisis data (Arikunto, 2000: 352). Dalam proses selanjutnya analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:16-21). Proses analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembinaan Rasa Kebangsaan Melalui *Citizenship Education*

Pembinaan yang dilakukan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni oleh Pemerintah (perangkat desa), tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Model pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui rapat-rapat atau rembuk desa dan program-program rutin seperti kegiatan gotong royong. Model pembinaan lebih kepada model persuasif dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mensukseskan program pemerintah. Pemerintah desa, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT berdasarkan hasil penelitian telah melaksanakan fungsinya, seperti mengupayakan agar masyarakat mengetahui program-program pemerintah. Dalam hal ini beberapa

kegiatan yang telah dilaksanakan untuk membina warga masyarakat setempat diantaranya kegiatan rapat / rembuk desa secara rutin, bergotong royong dalam kegiatan sehari-hari yang difasilitasi oleh perangkat desa, dan sosialisasi program pemerintah oleh perangkat desa, tokoh masyarakat bersama masyarakat umumnya.

Peran Tokoh Masyarakat sebagai perwakilan masyarakat yang dipandang memiliki pengaruh di masyarakat Desa Suruh Tembawang, tokoh masyarakat misalnya ketua Adat, dalam hal ini membantu memberikan contoh bagi masyarakat bahwa ketaatan kepada adat-istiadat dalam wujud kearifan lokal perlu dilestarikan dalam kerangka NKRI. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Suruh Tembawang merupakan wujud dari upaya pembinaan rasa kebangsaan melalui *Citizenship education*, yakni pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas tidak diajarkan hanya terbatas di sekolah, tetapi lebih kepada pendidikan masyarakat. *Citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan yang diberikan tidak melalui pendidikan formal di sekolah melainkan pendidikan di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Strategi *Citizenship education* dalam pembinaan rasa kebangsaan diajarkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan kerjasama para tokoh masyarakat, perangkat kecamatan dan desa yang bersangkutan secara berkesinambungan.

Selain itu, *Citizenship education* di desa Suruh Tembawang juga didukung oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan dalam membina masyarakat desa khususnya yang menempuh pendidikan formal dalam mengajarkan rasa kebangsaan Indonesia. Lembaga pendidikan / sekolah melalui pengajaran PKn yang mengajarkan tentang materi-materi terkait materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Guru di daerah perbatasan kebanyakan merupakan guru yang ditugaskan oleh dinas pendidikan (pemerintah) dan guru honorer yang datang dari swadaya masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan juga pada dasarnya bersifat persuasif melalui dotkrin-dotkrin yang ada pada materi ajar. Di Desa Suruh Tembawang, dari tingkat pendidikan telah cukup berkembang, walaupun terkesan terpencil sebagian dari anak-anak mereka telah mengenyam pendidikan sampai ke

jenjang perguruan tinggi. Sekolah yang ada di desa ini hanya sampai tingkat SMP, sementara untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya harus ke Kecamatan atau ke Kabupaten Sanggau.

Dampak Pembinaan Rasa Kebangsaan

Dampak pembinaan yang dilakukan oleh perangkat Desa (pemerintah), tokoh masyarakat, dan sekolah secara umum telah dirasakan masyarakat, terutama terkait dengan rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat Desa Suruh Tembawang. Ini terbukti dari masih tetap setianya masyarakat kepada NKRI meski dengan berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman yang baik oleh masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulianto (2012), menambahkan bahwa “wawasan kebangsaan dari sudut pandang implementasi etika moral dapat membangun komitmen kebangsaan”. Masyarakat telah memiliki syarat administratif sebagai warga negara, seperti KTP, KK dan akte kelahiran. Keberadaan masyarakat yang lebih sering ke Malaysia, menggunakan uang Ringgit dan menggunakan produk Malaysia sesungguhnya tidak terkait dengan masalah rasa kebangsaan atau nasionalisme, hal tersebut hanya sebatas upaya masyarakat memenuhi kebutuhan. Akses jalan dan jarak tempuh yang cukup sulit bagi masyarakat menuju Entikong sebagai ibu kota Kecamatan itulah yang menyebabkan mereka lebih memilih ke Malaysia.

Demikian juga dengan sebagian masyarakat yang bekerja ke Malaysia, mereka hanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di Indonesia. Ada sebagian masyarakat yang pindah atau menetap di Malaysia, akan tetapi tidak berkaitan langsung dengan rasa kebangsaan mereka lebih kepada karena menikah atau memperoleh pekerjaan tetap di sana. Hal ini tidak terlepas dari karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Jika pekerjaan tersedia dan akses jalan lebih mudah ke Indonesia, tentunya tidak banyak dari masyarakat yang mengantungkan hidupnya pada negara Malaysia.

Permasalahan di wilayah perbatasan yang utama adalah kesenjangan secara ekonomi. Sejalan dengan itu, Rini (2011) dikemukakan bahwa ada tiga persoalan di wilayah perbatasan. Pertama, dimensi lokal dapat dilihat dari adanya

kesenjangan pendapatan yang begitu jauh antara penduduk di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga. Kedua, permasalahan berdimensi nasional. Suatu rentang luas wilayah darat yang sukar di tempuh untuk berbagai kepentingan secara sosial ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan. Kondisi ini sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakkan kedaulatan di wilayah perbatasan. Ketiga, masalah berdimensi internasional. Selama ini kebijakan dunia internasional dalam menangani sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara Malaysia sering dirasakan tidak netral, misalnya sengketa pulau, tapal batas, perlakuan terhadap TKI dan masih banyak lagi persoalan lainnya yang menyangkut negara.

Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Perbatasan Indonesia – Malaysia sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah RI. Bentuk perhatian yang menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat adalah akses jalan. Hal ini dikarenakan dengan memiliki akses jalan yang baik akan membantu perkembangan perekonomian seperti dipermudah menjual hasil panen lada ke Kabupaten Sanggau, dimudahkan dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain akses jalan dapat membantu perkembangan perekonomian warga juga dapat membantu hal-hal yang berkaitan urusan administrasi seperti mengurus KTP, KK, Akte, nikah dan bentuk administrasi lain yang menunjukkan identitasnya selaku warga negara.

Sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa pembinaan yang dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat sangat menentukan sikap masyarakat terhadap negara. Hal ini terjadi karena masyarakat di daerah perbatasan jarang mendapat perhatian dari luar khususnya pemerintah pusat, bagi mereka perangkat desa dan tokoh masyarakat itulah yang mereka rasakan sebagai pemimpin mereka. Rasa kebangsaan yang terpelihara dengan baik tentu tidak terlepas dari seberapa jauh negara mampu meyakinkan masyarakat akan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat. Rasa kebangsaan merupakan perekat utama kesatuan dan persatuan masyarakat dan bangsa dalam wadah NKRI (Rustri, 2012). Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan program-program yang lebih terencana dan berkesinambungan bagi pembinaan masyarakat perbatasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Model pembinaan rasa kebangsaan melalui *citizenship education* pada masyarakat Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia lebih kepada model persuasif dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mensukseskan program pemerintah. Pembinaan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan penanaman nilai-nilai yang terintegrasi pada kegiatan rutin desa dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

2. Dampak dari pembinaan rasa kebangsaan melalui *citizenship education* pada masyarakat Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang dilakukan oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan munculnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme yang ditunjukkan dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat mendukung atau menjalankan program-program pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto Suharsimi. 2009. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadiwijoyo S, S. 2009. **Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris Yuridis)**. Yogyakarta: Gavamedia.
- Miles, Mattew B dan Hubermen, Michael. 1992. **Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru**, Terjemahan Tjetjep Rohendy (2007), Jakarta: UI Press.
- Rini, Candra U. 2011. **Paham Kebangsaan, Semangat kebangsaan, dan Faham Kebangsaan**. [Http:// wmahendra.blogspot.com](http://wmahendra.blogspot.com).
- Rusti dkk. 2002. **Mengaktualisasikan Wawasan Kebangsaan**. Makasar. Universitas Negeri Makasar.
- Syaifullah. 2009. **Nasionalisme di Tapal Batas, Sebatik Beranda yang Tak Terurus**. Kompas: Kalimantan Timur